

Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Qur'anul Kariem¹⁾, Sabillah²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jenderal Sudirman, No. 629 Km. 4,5 Kota Palembang
Email korespondensi : mquranul@uigm.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the educational background of members of parliament in the field of government studies, political science, or public administration related to their performance in government management, specifically in the area of oversight functions. The method used is literature review, analyzing and drawing conclusions from credible secondary data sources. The research findings indicate that the educational background of new politicians is limited to formal academic degrees and has not yet significantly impacted the implementation of effective oversight functions in government management. However, politicians do understand their roles and responsibilities as members of the council. The recommendation from this study is the appropriate use of information technology to provide transparent and accountable information on the execution of oversight functions to the public

Keywords : supervision, legislative, accountable

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai latar belakang Pendidikan anggota dewan pada bidang ilmu pemerintahan atau ilmu politik atau ilmu administrasi public terkait dengan kinerja yang dilakukan dalam manajemen pemerintahan yaitu pada fungsi pengawasan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber informasi yang kredibel yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Pendidikan politisi baru sebatas gelar formal akademik, belum berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang sesuai dengan manajemen pemerintahan yang baik. Namun, politisi memahami lingkup tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Saran dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk dapat membantu memberikan informasi pelaksanaan fungsi pengawasan yang transparan dan akuntabel kepada Masyarakat.

Kata Kunci : pengawasan, dewan, akuntabel

1. Pendahuluan

Politisi dari Partai Politik yang mengikuti dan terpilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada cabang kekuasaan legislatif, akan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bekerja menjalankan amanah selama 5 (lima) tahun. Anggota Legislatif memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang melekat pada tugas yang diemban dalam masa persidangan maupun masa diluar persidangan (reses). Hal ini juga tercermin pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024, memiliki berjumlah 75 anggota dari 11 partai politik dalam 10 daerah pemilihan (<https://www.antaranews.com/>, 2019).

Dari jumlah anggota dewan tersebut, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda – beda, salah satunya adalah latar belakang Pendidikan formal. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa latar belakang politisi memberikan pengaruh pada kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislative. Penelitian yang dilakukan oleh Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019) menyebutkan bahwa pengetahuan anggota dewan terkait dengan anggaran berpengaruh signifikan pada pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, terdapat juga

penelitian dari Yuliani (2021) menyebutkan bahwa latar belakang personal dan pengetahuan dewan berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun dalam hal ini, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan kondisi sebaliknya, dimana latar belakang Pendidikan tidak berdampak langsung terhadap kinerja anggota dewan. Penelitian dari Malik, Rauf, dan Haerahan (2021) menyatakan bahwa pendidikan tidak cukup berdampak signifikan pada kinerja anggota dewan dalam menyerap aspirasi Masyarakat. Penelitian lain yang serupa dengan hasil ini adalah penelitian dari Holilah & Ismail (2023) yang menyimpulkan bahwa latar Pendidikan tinggi (sarjana) tidak memberikan perbedaan signifikan pada anggota dewan terkait model komunikasi yang digunakan dalam masa diluar persidangan (reses).

Permasalahan latar belakang Pendidikan dewan juga dibahas dalam penelitian dari Samson, Liando & Kimbal (2019) yang menyebutkan bahwa faktor latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai, berdampak pada minimnya kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh penelitian dari Dendeng, Dengo, & Londa (2020) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan, pengalaman organisasi, dan kemampuan finansial tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan intelektualnya untuk

menjalankan tiga fungsi legislative. Latar belakang Pendidikan yang beragam membuat anggota dewan juga tidak terlalu memahami hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Prayoga., Lubis., & Dalimunthe, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait latar belakang personal dan pengetahuan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak memberikan dampak pada pelaksanaan fungsi legislative, namun sebaliknya terkait dengan latar belakang Pendidikan justru memiliki dampak. Latar Belakang personal dan pengetahuan tidak sama dengan latar belakang Pendidikan anggota dewan, sehingga factor latar belakang Pendidikan berperan penting dalam kinerja anggota dewan. Kajian ini akan mengambil sudut pandang lain, yaitu terkait dengan latar belakang Pendidikan tinggi pada bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara atau ilmu politik yang dimiliki oleh politisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafiie (2011) bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan, membuat aturan dalam institusi legislative, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pemerintah dengan rakyat dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Sedangkan ilmu politik menurut Wilbur White yang dikutip dari Syafiie (2011) adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, proses negara-negara dan pemerintahan – pemerintahan. Terkait dengan definisi administrasi negara, Dwigh Waldo sebagaimana dikutip dari Syafiie (2011) mengungkapkan bahwa administrasi negara adalah manajemen organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya mencapai tujuan pemerintah.

Bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara (administrasi publik), dan ilmu politik menjadi bidang yang cukup relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi legislatif dalam hal ini adalah DPRD, maka dari itu latar belakang pendidikan pada bidang tersebut menjadi sudut pandang yang akan dianalisis dalam kajian ini. Objek kajian adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024, yang pertama adalah dari Fraksi Partai Golkar dan PPP, terdiri dari 14 (empat belas) anggota, yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan terdapat 1 (satu) anggota. kedua adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terdiri dari 11 (sebelas) anggota, yang terdapat juga 1 (satu) anggota berlatar belakang Pendidikan administrasi publik.

Ketiga adalah fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (gerindra) yang memiliki 10 (sepuluh) anggota, yang tidak terdapat yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Keempat adalah fraksi partai demokrat yang memiliki 9 (Sembilan) anggota, dimana 2 diantaranya memiliki latar belakang Pendidikan administrasi negara (public), kelima fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) yang memiliki 8 (delapan) anggota tanpa latar belakang disiplin ilmu tersebut. Keenam fraksi partai amanat nasional (PAN) yang memiliki 5 (lima) anggota, ketujuh Fraksi Partai NasDem yang memiliki 6 (enam) anggota, kedelapan

fraksi partai keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 6 (enam) anggota dengan 1 (satu) anggota yang berlatar Pendidikan ilmu pemerintahan, dan kesembilan adalah fraksi hanura dan perindo dengan jumlah 6 (enam) anggota.

Tabel 1.0. Profil Pendidikan Anggota DPRD Prov. Sumatera Selatan

No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Profil Pendidikan Ilmu Pemerintahan/Adm. Publik
1	Golkar & PPP	14 orang	1 orang
2	PDI Perjuangan	11 orang	1 orang
3	Gerindra	10 orang	-
4	Demokrat	9 orang	2 orang
5	PKB	8 orang	-
6	PAN	5 orang	-
7	NasDem	6 orang	-
8	PKS	6 orang	1 orang
9	Hanura-Perindo	6 orang	-
Jumlah		75 orang	5 orang

Sumber : diolah penulis dari <https://dprd.sumselprov.go.id/>

Dari total 75 anggota dewan, hanya 5 orang yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan/ilmu administrasi public atau sekitar 6,75%. Maka dari itu, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan tugas anggota dewan berdasarkan latar belakang Pendidikan yang dimiliki. Kajian ini akan dibahas dengan menggunakan metode kepustakaan, untuk membuat kajian berbasis data sekunder yang diambil dari sumber-sumber media yang terpercaya, yang dianalisa dengan perspektif teoritis dan pada akhirnya ditarik kesimpulan (Zed, 2011)

2. Pembahasan

Kinerja anggota DPRD dapat diukur dengan beberapa indicator, salah satunya adalah pada indicator keberhasilan dalam manajemen pemerintahan selama 5 (lima) tahun bersama dengan pemerintah daerah, pada periode 2019-2024. Manajemen pemerintahan yang baik yang diungkapkan oleh Dede Mariana sebagaimana dikutip dalam Nurman (2019) mengkategorikan sebagai berikut, pertama adalah perencanaan, kedua adalah pengorganisasian, ketiga adalah penyusunan sumber daya manusia, keempat adalah pengarahan, dan kelima adalah pengawasan. Artikel ini akan menyoroti aspek manajemen pemerintahan yang baik, yaitu pada aspek kelima yaitu pengawasan. Pengawasan yang baik dilakukan dengan menetapkan standar pengawasan yang jelas, pengukuran antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan, dan melakukan Tindakan korektif apabila tidak memenuhi standar tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi golkar yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan, melakukan pengawasan berupa sidak (inspeksi mendadak) di Bank Sumsel Babel Cabang

Kayuagung dan meminta perusahaan daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan membantu perekonomian Masyarakat sekitar (<https://www.radarsriwijaya.com/>, 2023). Ia bersama anggota lain juga melakukan peninjauan harga beras di kantor perum bulog divisi regional sumsel & babel, dan meminta untuk mendorong peningkatan penyebaran beras Cadangan bulog ke Masyarakat (<https://beritapagi.co.id/>, 2023). Pada masa reses bersama tim politisi dari fraksi partai Golkar tersebut juga mendorong untuk peningkatan biaya makan di panti sosial lansia yang dikelola oleh pemerintah daerah (<https://beritapagi.co.id/>, 2024).

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu administrasi publik (dalam proses studi), juga melakukan kerja-kerja pengawasan, diantaranya adalah pengawasan terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi, agar tepat sasaran dengan proses verifikasi yang baik yang dilakukan dinas terkait (<https://www.rmolsumsel.id/>, 2022). Ia juga melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Prabumulih Timur di Kota Prabumulih dalam rangka mengawasi dana bantuan gubernur yang disalurkan pada tahun 2021 (<https://beritakajang.com/>, 2022).

Pengawasan juga disampaikan secara terbuka, terkait permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan Solusi kepada Masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tersebut, bukan hanya asal main tangkap (<https://sumselsatu.com/>, 2023). Hasil reses secara kolektif dari Dapil IV Sumsel, juga disampaikan sebagai bentuk dari pengawasan terhadap pemerintah daerah, beberapa diantaranya adalah infrastruktur jalan (<https://beritapagi.co.id/>, 2024). Kasus lain adalah terkait dengan pernyataan anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, yang meminta pemerintah daerah untuk lebih tertib dan cermat serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai masalah kelebihan bayar upah pungut di provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yang lalu (<https://www.rmolsumsel.id/>, 2023).

Anggota dewan lain yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu administrasi public adalah dari partai democrat. Anggota dewan yang pertama dari fraksi democrat tersebut latar belakang keilmuannya adalah Pendidikan S2 (Magister), ia berkomitmen untuk mempercepat Pembangunan desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI) (<https://www.sibersumsel.com/>, 2023). Ia juga melakukan pengawasan dengan meminta pemerintah daerah untuk dapat melakukan Langkah preventif, persuasive, hingga represif bila diperlukan, terkait dengan permasalahan tawuran antar remaja yang terjadi di Kota Palembang (<https://fornews.co/>, 2023). Pada bidang Pendidikan, berdasarkan penugasan yang bersangkutan di komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bahwa ia melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada dinas Pendidikan untuk menangani permasalahan Tindakan kekerasan dari oknum guru

kepada siswi di salah satu SMA di Kabupaten Ogan Ilir (<https://sumselterkini.co.id/>, 2020).

Kinerja anggota dewan dari fraksi democrat tersebut juga ditunjukkan dalam pengawasan yang dilakukan di perusahaan yang bergerak di industry bubur kertas yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia menemukan bahwa dari penduduk sekitar masih cukup rendah, dan juga tidak transparannya data-data terkait komposisi tenaga kerja di perusahaan tersebut dan meminta pemerintah daerah dalam hal ini pada dinas tenaga kerja untuk dapat melakukan memperhatikan permasalahan ini (<https://bidiksumsel.com/>, 2023). Sementara itu, anggota dewan kedua dari fraksi democrat yang memiliki Pendidikan yang sama, melakukan reses secara kolektif dan akan memperjuangkan aspirasi dari Masyarakat melalui berbagai pihak terkait harga gabah yang seringkali anjlok pada musim panen (<https://beritasebelas.id/>, 2023). Ia banyak melakukan pemberian bantuan-bantuan kepada Masyarakat, diantaranya adalah pemberian bantuan mesin penggiling padi pada kelompok tani di Kabupaten OKU Timur (<https://www.beritasumsel.co.id/>, 2023). Bantuan lain yang diberikan adalah terkait dengan bantuan alat usaha untuk pelaku UMKM yang juga diberikan di kabupaten yang sama (<https://palembangnian.com/>, 2023). Dari beberapa hal tersebut, ia juga ingin mendirikan rumah aspirasi untuk menampung segala bentuk permohonan proposal dari Masyarakat untuk dapat disampaikan ke instansi terkait atau ditindaklanjuti secara pribadi (<https://www.viralsumsel.com/>, 2022).

Terakhir adalah anggota dewan dari fraksi partai keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki jenjang Pendidikan strata dua ilmu administrasi public. Ia menyerap berbagai aspirasi dari tokoh-tokoh Masyarakat dalam masa reses yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dapat ditindaklanjuti (<https://www.rri.co.id/>, 2024). Ia bersama anggota fraksi PKS lain juga menyumbangkan gaji untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan (<https://www.viralsumsel.com/>, 2020). Pada saat reses bersama, ia juga menyoroti perbaikan fasilitas dan pengembangan wisata di pelataran Sungai musi di seputaran pasar 16 Kota Palembang yang harusnya dilakukan dengan wewenang pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan juga yang merupakan wewenang pemerintah kota Palembang (<https://beritapagi.co.id/>, 2023).

Dari 5 (lima) anggota dewan yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan atau politik atau administrasi publik yang berasal dari 3 fraksi partai politik, menunjukkan bahwa masing – masing menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan dengan cukup baik. Terdapat anggota dewan yang benar-benar memahami pelaksanaan fungsi pengawasan, dan menjalankan fungsi itu dengan maksimal melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung. Pemahaman anggota dewan terhadap Batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pembangunan komunikasi yang

dilakukan dengan pemerintah. Namun terdapat juga anggota dewan yang tidak menjalankan fungsi pengawasan tersebut sebagaimana mestinya, namun berubah menjadi fasilitator yang mencoba memenuhi permintaan yang diajukan Masyarakat.

Walaupun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun dari data-data sekunder terkait dengan aktivitas anggota dewan dari 3 fraksi partai politik tersebut, bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota dewan tidak benar-benar memiliki instrumen yang jelas dan terukur serta dapat dikontrol (akuntabel) oleh Masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan semata hanya dilaksanakan secara normatif, bahkan seringkali Masyarakat yang menyampaikan aspirasi juga tidak benar-benar dapat memahami atau memilah lingkup wewenang pemerintah yang dimaksudkan.

5 (lima) anggota dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan belum menetapkan standar pengawasan yang jelas terhadap objek-objek yang akan diawasi. Dampaknya, pengukuran tidak dapat dilakukan saat pengawasan dilakukan dilapangan. Untuk Tindakan korektif yang seharusnya dapat dilakukan setelah mengetahui terdapat permasalahan dari objek pengawasan juga tidak dapat diketahui dengan pasti Tindakan yang dilakukan atau hasilnya. Latar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan atau politik atau administrasi public yang dimiliki dapat diartikan baru sebatas gelar formal, dan belum dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang benar. Namun disamping itu, latar belakang Pendidikan dari politisi tersebut mayoritas menunjukkan pemahaman lingkup tanggungjawab dan tugas setiap anggota dewan sampai dengan pemerintah daerah yang memiliki otoritas terhadap hal itu.

3. Kesimpulan

Berdasarkan kinerja pada manajemen pemerintahan terkait dengan fungsi pengawasan, bahwa anggota dewan yang melaksanakan fungsi tersebut sesungguhnya tidak benar-benar menetapkan standar pengawasan yang jelas, pengukuran, serta Tindakan korektif terhadap permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan masih dilaksanakan secara normatif tanpa adanya proses yang akuntabel yang dapat dikontrol terhadap setiap pengawasan dari kebijakan pemerintah. Latar belakang Pendidikan politisi juga tidak memberikan dampak yang cukup substansial, karena baru menjadi sebatas gelar akademik formal. Namun praktiknya, pemahaman terhadap ruang lingkup otoritas atau kewenangan pemerintahan sudah cukup baik.

Rekomendasi terhadap hasil penelitian atau kajian ini adalah bahwa hendaknya anggota dewan dapat menetapkan standar pengawasan yang baku, sehingga dapat menjadi instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan dan Tindakan yang sudah diambil atau

ditindaklanjuti semestinya dapat dikontrol oleh Masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat, sehingga Masyarakat mendapatkan informasi dan dapat memberikan feedback terhadap kinerja anggota dewan.

Daftar Pustaka

- Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Apbd Di Kabupaten Klaten. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 224-238.
- DENDENG, F., DENGGO, S., & LONDA, V. (2020). Kemampuan pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Holilah, H., & Ismail, M. (2023). Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan : (Studi berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD). *Indonesian Journal of Political Studies*, 3(2), 150–175. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.2.150-175>
- Malik, M. inna, Rauf, A., & Haeranah, H. (2021). PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MODEL KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 2(1), 46–55. Retrieved from <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/1138>
- Nurman, Nurman. (2019). *Startegi Pembangunan Daerah*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Prayoga., Lubis., & Dalimunthe. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 380-388. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.877>
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Rinneka Cipta
- Samson, M. S. F., Liando, D., & Kimbal, A. (2019). FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DI KOTA TIDORE KEPULAUAN. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23914>
- YULIANI, W. S. (2021). Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(2), 903-913.

- Inilah 75 anggota DPRD Sumsel terpilih 2019 – 2024, diakses pada : <https://www.antaraneews.com/berita/1007294/inilah-75-anggota-dprd-sumsel-terpilih-2019-2024> , 12 Agustus 2019
- Komisi III DPRD Sumsel Apresiasi Pasar Beduk BSB Kayuagung, diakses pada : <https://www.radarsriwijaya.com/2023/04/12/komisi-iii-dprd-sumsel-sidak-pasar-beduk-bsb-kayuagung> , berita tanggal 12 April 2023
- Harga Beras Masih Tinggi, DPRD Sumsel Sarankan Ini, diakses pada : <https://beritapagi.co.id/2023/10/20/harga-beras-masih-tinggi-dprd-sumsel-sarankan-ini/> , berita tanggal 20 Oktober 2023
- Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II, Ini Hasilnya, diakses pada : <https://beritapagi.co.id/2024/01/31/reses-anggota-dprd-sumsel-dapil-sumsel-ii-ini-hasilnya/> , berita pada 31 Januari 2024
- Pupuk Subsidi Langka, Dewan Sumsel Minta Dinas Terkait Lakukan Validasi Data, diakses : <https://www.rmolsumsel.id/pupuk-subsidi-langka-dewan-sumsel-minta-dinas-terkait-lakukan-validasi-data> , berita pada 8 Agustus 2022
- Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Kunjungan Kerja Monitoring Bangub ke Prabumulih, diakses : <https://beritakajang.com/2022/08/02/wakil-ketua-dprd-sumsel-giri-ramanda-kunjungan-kerja-monitoring-bangub-ke-prabumulih/> , berita pada 2 Agustus 2022.
- Giri Ramanda Serap Aspirasi Masyarakat Gelumbang, diakses : <https://sumselsatu.com/giri-ramanda-serap-aspirasi-masyarakat-gelumbang/> pada 17 Oktober 2023
- Berbagai Hal Disampaikan Dalam Hasil Reses Anggota DPRD Sumsel, diakses : <https://beritapagi.co.id/2024/02/19/berbagai-hal-disampaikan-dalam-hasil-reses-anggota-dprd-sumsel/> , pada 19 Februari 2024
- Potensi Korupsi dari Kelebihan Bayar Upah Pungut Pemprov Sumsel, Siapa Bertanggung Jawab?, diakses : <https://www.rmolsumsel.id/potensi-korupsi-dari-kelebihan-bayar-upah-pungut-pemprov-sumsel-siapa-bertanggung-jawab> pada 22 Mei 2023
- H Muchendi Siap Kawal Aspirasi Percepat Pembangunan Desa di Kabupaten OKI dan OI, diakses : <https://www.sibersumsel.com/h-muchendi-siap-kawal-aspirasi-percepat-pembangunan-desa-di-kabupaten-oki-dan-oi/16848/> pada 23 Oktober 2023
- Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki Angkat Bicara Soal Maraknya Tawuran di Palembang, diakses : <https://fornews.co/news/wakil-ketua-dprd-sumsel-muchendi-mahzareki-angkat-bicara-soal-maraknya-tawuran-di-palembang/> , pada 3 Juni 2023
- Muchendi Soroti Tenaga Kerja di PT. Oki Pulp & Paper, diakses : <https://bidiksumsel.com/muchendi-soroti-tenaga-kerja-di-pt-oki-pulp-paper/> pada 3 September 2023
- Petani Minta Harga Gabah Jangan Turun, diakses : <https://beritasebelas.id/petani-minta-harga-gabah-jangan-turun/> pada 19 Maret 2023
- Azmi Shofix Beri Bantuan Alat untuk Pelaku UMKM di OKU Timur, diakses : <https://palembangnian.com/azmi-shofix-beri-bantuan-alat-untuk-pelaku-umkm-di-oku-timur/> pada 19 Juni 2023
- Azmi Shofix Bangun Rumah Aspirasi untuk Rakyat, diakses : <https://www.viralsumsel.com/azmi-shofix-bangun-rumah-aspirasi-untuk-rakyat/> pada 19 September 2022
- Reses DPRD Sumsel, Legislator Sampaikan Aspirasi Konstituen, diakses : <https://www.rri.co.id/daerah/566132/reses-dprd-sumsel-legislator-sampaikan-aspirasi-konstituen> pada 22 Februari 2024
- Enam Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKS Alokasikan Gajinya untuk Penanganan Covid-19, diakses : <https://www.viralsumsel.com/enam-anggota-dprd-sumsel-fraksi-pks-alokasikan-gajinya-untuk-penanganan-covid-19/amp/> pada 2020
- Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil II Sorot Pelataran Sungai Musi Seputaran Pasar 16 Ilir Untuk Pengembangan Wisata, diakses : <https://beritapagi.co.id/2023/10/18/anggota-dprd-provinsi-sumsel-dapil-ii-sorot-pelataran-sungai-musi-seputaran-pasar-16-ilir-untuk-pengembangan-wisata/> berita pada 18 Oktober 2023